

# **RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024**



## **KANTOR KECAMATAN SARANG**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT , karena atas petunjuk-NYA, kami dapat menyusun Rencana Kerja Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2024. Renja Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang ini disusun untuk memenuhi amanah dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah , Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renja Kecamatan Sarang Tahun 2024 berpedoman pada Perda Nomor 2 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2021 -2026, Renstra Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026, dan RKPD Kabupaten Rembang Tahun 2024 dengan tujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran , serta perkiraan maju. Rencana Kerja memuat evaluasi hasil capaian Renja Kecamatan Sarang pada Triwulan I dan II dengan perkiraan realisasi Renstra pada tahun berjalan. Tujuannya untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan, termasuk kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam Renja OPD dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang Tahun 2021 – 2026.

Dengan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang Tahun 2024, kami berharap dapat

memberikan nilai manfaat dalam proses Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Rembang.

Sarang, 10 Agustus 2023



**CAMAT**

**NASATON ROFIQ,SH**

Pembina Tk.I

NIP. 19720209 199112 1 001

## DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR TABEL .....	vi
DAFTAR GAMBAR .....	vii
BAB I    PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	6
1.3 Maksud dan Tujuan .....	8
1.4 Sistematika Penulisan .....	9
BAB II    HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....	11
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kec. Sarang Kab. Rembang Tahun 2022 .....	11
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang .....	95
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Sarang .....	97
2.4 Review Terhadap RKPD .....	106
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	136
BAB III    TUJUAN DAN SASARAN KANTOR KECAMATAN SARANG KABUPATEN REMBANG .....	138
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan	

	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah .....	138
	3.3 Tujuan dan Sasaran Renja Kantor Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang .....	140
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN SARANG TAHUN 2024 .....	143
BAB V	PENUTUP .....	164

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 .....	13
Tabel 2.2	Realisasi Kinerja dan Keuangan Kantor Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang Tahun 2022 .....	54
Tabel 2.3	Capaian Indikator Kinerja Utama Kantor Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang .....	96
Tabel 2.4	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Kecamatan Sarang Yang Mempengaruhi Pencapaian Visi, Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah..	101
Tabel 2.5	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 .....	108
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kantor Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 .....	141
Tabel 4.1	Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 .....	145

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Tahapan Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah .....	5
Gambar 1.2	Keterkaitan Antara Renja Dengan Dokumen .....	6

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renja Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja apabila diartikan berdasarkan frasa yakni terdiri dari kata rencana dengan definisi rancangan, konsep maupun laporan pemberitaan (KBBI, 2008:1194), sedangkan kerja dapat dimaknai sebagai kegiatan melakukan sesuatu (KBBI, 2008:703). Oleh karena itu rencana kerja juga dapat diartikan sebagai suatu rancangan terhadap kegiatan yang akan dilakukan.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah sebagaimana termuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Bagian Ketujuh yang membahas mengenai Tata Cara Penyusunan Renja Perangkat Daerah dimulai dari tahap Persiapan. Persiapan merupakan pra kondisi yang diciptakan sebagai upaya



insepsi<sup>1</sup> dengan tujuan untuk penyamaan persepsi dan memberikan pemahaman terhadap berbagai peraturan perundang-undangan berkaitan dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah, keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya, teknis penyusunan dokumen, dan menganalisis serta menginterpretasikan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang diperlukan dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Selanjutnya dari persiapan yang telah dilaksanakan dan merujuk pada pasal 126 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, maka perangkat daerah menyusun rancangan awal Renja Perangkat Daerah. Penyusunan tersebut dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Penyusunan Rancangan Awal Renja berpedoman kepada Renstra yang bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah. Penyusunan Rancangan Awal Renja juga mempedomani hasil evaluasi Renja yang dilaksanakan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah.

---

<sup>1</sup> Insepsi merupakan serapan kata dari *inception* yang berarti permulaan atau pembentukan  
(<https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/inception>)

Rancangan awal Renja sebagaimana pasal 130 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 disempurnakan dengan mengacu pada surat edaran Kepala Daerah mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran rancangan awal RKPD.

Kecamatan merupakan perangkat daerah sebagai unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris daerah. Dalam menjalankan tugasnya camat dibantu oleh perangkat kecamatan. Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan artinya keberadaan kecamatan sangat dibutuhkan dalam rangka membantu bupati dalam menjalankan tugas pemerintahan umum dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dalam menjalankan urusan otonomi daerah. Camat sebagai pimpinan tertinggi di Kecamatan harus dapat mengkoordinasikan semua urusan pemerintahan di Kecamatan, kemudian camat harus memberikan pelayanan publik di kecamatan dan juga pemberdayaan masyarakat Desa.

Selain itu dalam implementasi penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa , camat harus

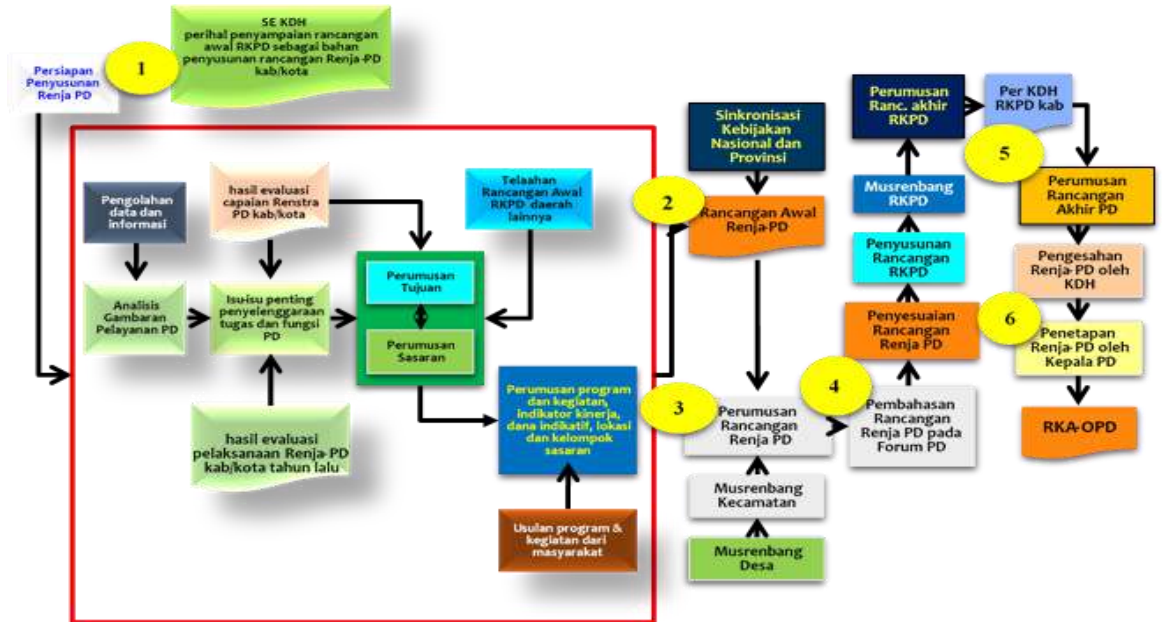
Menjalankan tugas pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Banyaknya beban tugas dan tanggung jawab yang harus dijalankan oleh kecamatan sudah seharusnya mendapatkan perhatian dan dukungan yang nyata dari pemerintah daerah. Keterbatasan sumber daya manusia dan keterbatasan anggaran di kecamatan sudah seharusnya dapat di selesaikan guna mendukung pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan umum di tingkat kecamatan dan desa. Pemenuhan sumberdaya aparatur dan anggaran yang cukup akan membantu meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di tingkat kecamatan.

Dalam prosesnya, penyusunan Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD. Oleh karena itu penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dikerjakan secara simultan/ paralel dengan penyusunan Renja Perangkat Daerah, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2022 dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja pada Renja Kantor Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang Tahun 2022. Tahap penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan sebagai pedoman dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Renja Perangkat Daerah dijadikan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas Perangkat Daerah pada tahun anggaran berkenaan.

Gambar 1.1

Tahapan Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah

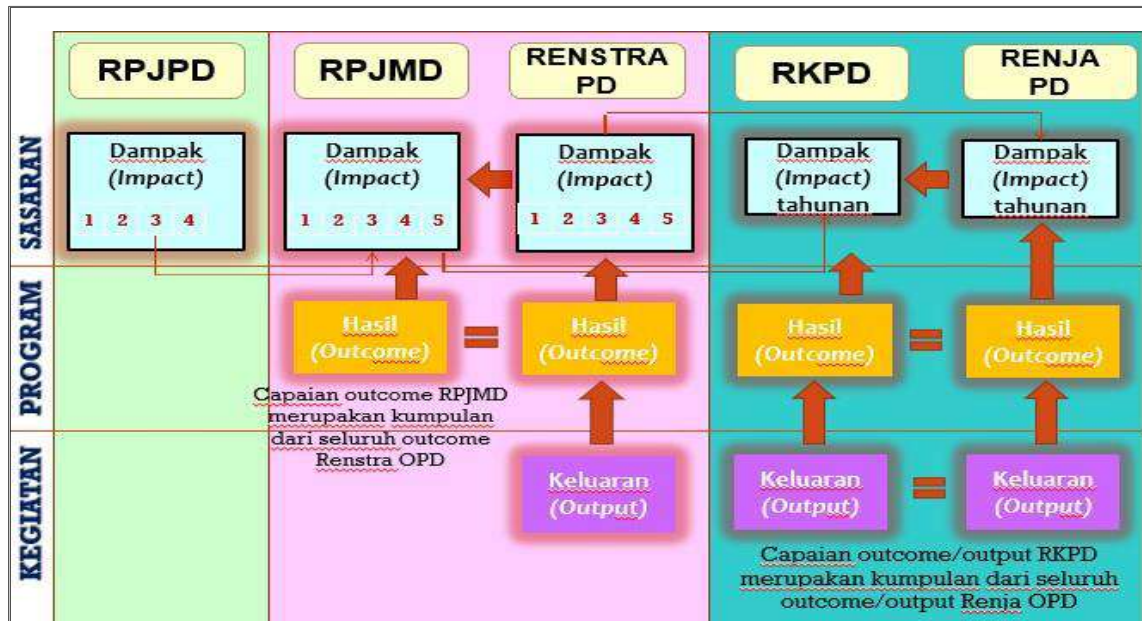


Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 (diolah).

Penyusunan Renja dengan tahapan Rancangan Awal, Rancangan Akhir dan Rencana Kerja yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah sebagai suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah tentunya tidak lepas dari Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Keterkaitan antar Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah tersebut dijelaskan sebagaimana gambar 1.2. Berdasarkan gambar tersebut dapat kita simpulkan bahwa Renja sebagai dokumen perencanaan tahunan mengacu serta bersumber dari Renstra serta RKPD, sehingga arah perencanaan

pembangunan perangkat daerah selaras dengan pembangunan di daerah.

**Gambar 1.2 Keterkaitan Antara Renja dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah**



Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 (diolah).

### 1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Kantor Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2022;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026;
10. Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2023;
11. Peraturan Bupati Rembang Nomor 32 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
12. Peraturan Bupati Rembang Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan;
13. Peraturan Bupati Rembang Nomor 24 tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1 Maksud**

Penyusunan Renja Kantor Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang tahun 2024 dimaksudkan untuk merumuskan program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kantor Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang selama satu tahun. Rumusan yang disusun adalah wujud dari perencanaan pembangunan yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan dan diharapkan berkontribusi dalam mendukung pencapaian visi, misi

dan tujuan pembangunan Kabupaten Rembang yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran disertai indikator kinerja dan pendanaannya.

### **1.3.2 Tujuan**

Penyusunan Renja Kantor Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang tahun 2024 bertujuan :

1. Mengevaluasi pelaksanaan Program/Kegiatan Tahun 2022 sebagai bahan penyusunan Renja Kantor Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang Tahun 2024;
2. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kantor Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang Tahun 2024 dan program/kegiatan yang ada di Rencana Kerja (Renja) kedalam Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran (KUA -PPAS) Tahun 2024;
3. Mengetahui isu-isu penting dalam penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kantor Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang beserta peluang dan tantangan yang dihadapi;
4. Menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk memperbaiki kualitas keputusan pimpinan.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Dokumen Renja Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :



## BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang perlunya Renja, maksud dan tujuan, landasan hukum dan uraian singkat tentang sistematika penyusunan Renja.

## BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1).

## BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat tentang tujuan, sasaran dan kegiatan dari penyusunan Renja merupakan suatu aspek yang dapat menggambarkan program yang diinginkan .

## BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Bab ini memuat tentang Pendanaan Kecamatan Sarang

## BAB V .PENUTUP

**BAB II**  
**HASIL EVALUASI RENJA**  
**PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

**2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang Tahun 2022**

Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra perangkat daerah serta permasalahan dan hambatan yang dihadapi. Evaluasi Rencana Kerja Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang tahun lalu pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja program/kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang selama kurun waktu tahun 2021 dan 2022. Untuk mengukur kinerja diperlukan penetapan seperangkat indikator kinerja yang merupakan alat untuk mengukur pencapaian suatu kebijakan/program/kegiatan dan sekaligus merupakan indikator untuk mengevaluasi dan menilai kinerja sebuah instansi.

Berdasarkan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang secara spesifik digunakan untuk menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Penetapan indikator-indikator kinerja ini harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan

sasaran yang ditetapkan, serta data pendukung yang terorganisasi, sehingga keberhasilan pencapaiannya dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran pada tahun yang bersangkutan.

Berikut adalah tabel Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu s/d tahun 2022

Tabel 2.1.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan  
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (Output) Th. 2021	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (Output) Th. 2022	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan ( Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
	Urusan Umum										

	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>										
<b>7,01</b>	<b>KECAMATAN</b>										
7.01.01.	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/K OTA</b>	<b>Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum</b>			100						
		<b>Persentase Ketercukupan Sarana dan Prasarana</b>			100						
		<b>Persentase Pemenuhan Pelayanan Kepegawaian</b>			100						
		<b>Persentase Pemenuhan</b>			100						

		<b>Pelayanan Keuangan</b>									
		<b>Persentase Keselarasan Perencanaan terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah</b>			100						
		<b>Persentase Informasi Yang Disampaikan Ke Publik</b>			100						
		<b>Nilai SAKIP OPD</b>	65		<b>65</b>	na	Na	67	67	100	
7.01.01.	Perencanaan,	Jumlah				Na		Na	Na		

2.01	Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaa n Perangkat Daerah yang disusun			3						
		Jumlah Dokumen Laporan kinerja yang disusun			1	Na			Na	Na	
			% Keselarasan Perencanaan terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100		100	100	100	100	100	100
7.01.01. 2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah dokumen Perencanaa			3 dok	Na			Na	Na	

	Perangkat Daerah	n Perangkat Daerah yang disusun									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dok		2 dok	2	100	2 dok	2 dok	100
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA yang disusun			2 dok	Na			Na	Na	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dok		2 dok	2	100	2 dok	2 dok	100



7.01.01. 2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan kinerja yang disusun			2 dok	Na			Na	Na	
		Jumlah informasi yang disampaika n ke publik			3 info	Na			Na	Na	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 lap		6	6	100	7	7	100
7.01.01. 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen pelaporan keuangan dengan			4 dok	Na			Na	Na	

		kualitas baik									
			% Dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas baik	100		100	100	100	100	100	100
7.01.01. 2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas baik terkait pelayanan pembayaran gaji dan tunjangan ASN			1 dok	Na			Na	Na	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	24 org		19 org	19	100	19 org	19 org	100

			Tunjangan ASN								
7.01.01. 2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas baik			2 lap	Na			Na	Na	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dok		na	12	100	12	12	100
7.01.01. 2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen pelaporan keuangan akhir tahun dengan			100	Na			Na	Na	

		kualitas baik									
			Jumlah Laporan Keu Akhir tahun skpd	2		2	2	100	2	2	100
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen manajemen kepegawaian yang dikelola dengan baik			10 dok	Na			Na	Na	
			% dokumen kepegawaian yang dikelola dengan baik	100		100	<b>100</b>	<b>100</b>	100	100	100
7.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi	3	3	3	<b>3</b>	<b>100</b>	3	3	100

			Kepegawaian								
7.01.01. 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	% pemenuhan pelayanan administras i perkantoran			100	Na			Na	Na	
			% pemenuhan pelayanan umum	100		100	100	100	100	100	100
7.01.01. 2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor	% pemenuhan pelayanan administras i perkantoran dalam pelayanan penerangan tempat kerja			100	Na			Na	Na	

			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor yang Disediakan	12		12	12	100	12	12	100
7.01.01. 2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	% pemenuhan pelayanan administras i perkantoran dalam penyediaan sarana kerja aparatur			100	Na			Na	Na	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	12		Na	na	na	Na	Na	100

			Disediakan								
7.01.01. 2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	% pemenuhan pelayanan administras i perkantoran dalam pemeliharaa n kebersihan lingkungan kantor			100	Na			Na	Na	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12		12	12	100	12	12	100
7.01.01. 2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	% pemenuhan pelayanan administras			100	Na			Na	Na	

		i perkantoran dalam penyediaan bahan logistik kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12		12	12	100	12	12	100
7.01.01. 2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	% pemenuhan pelayanan administras i perkantoran			100	Na			Na	Na	
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang	12		12	12	100	12	12	100



			Disediakan								
7.01.01. 2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	% pemenuhan pelayanan administras i perkantoran			100	Na			Na	Na	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	12		Na	na	na	Na	Na	
7.01.01. 2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	% pemenuhan pelayanan administras i perkantoran			100	Na			Na	Na	
			Jumlah Paket Bahan/Material	12		12	12	100	12	12	100

			yang Disediakan								
7.01.01. 2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	% pemenuhan pelayanan administras i perkantoran dalam pelayanan pelaksanaa n Perjalanan Dinas aparatur			100	Na			Na	Na	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12		12	12	100	12	12	100

7.01.01. 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% pemenuhan pelayanan administras i perkantoran			100	Na			Na	Na	
			% pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100		100	100	100	100	100	100
7.01.01. 2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	% pemenuhan pelayanan administras i perkantoran			100	Na			Na	Na	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	12		12	12	100	12	12	100

			Air dan Listrik yang Disediakan								
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12		12	12	100	12	12	100
7.01.01. 2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	% pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran			100	Na			Na	Na	

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12		12	12	100	12	12	100
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	% Ketercukupan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur			100	Na			Na	Na	
			% Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100		100	100	100	100	100	100
	<i>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	% Ketercukupan Peralatan			100	Na			Na	Na	

		mesin lainnya									
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang Disediakan</i>	5		5	5	100	5	5	100
	<i>Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	<i>% Ketercukupa n Gedung Kantor dan bangunan lainnya</i>			100	Na			Na	Na	
			<i>Jumlah Paket gedung kantor atau bangunan lainnya yang Disediakan</i>	1		1	1	100	1	1	100
7.01.01. 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen pengelolaan			100	Na			Na	Na	

	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BMD yang dikelola dengan baik									
			% BMD dengan kondisi Baik	100	100	100	100	100	100	100	100
7.01.01. 2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah dokumen pengelolaan BMD yang dikelola dengan baik			100	Na			Na	Na	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	18 unit		18 unit	18	100	18 unit	18 unit	100

			yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya								
7.01.01. 2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah dokumen pengelolaan BMD yang dikelola dengan baik			100	Na			Na	Na	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	27 unit		27 unit	27	100	27 unit	27 unit	100
7.01.01. 2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah dokumen pengelolaan BMD yang dikelola dengan baik			100	Na			Na	Na	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan	1	100	1	1	100	1	1	100



			Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi								
	Penataan Organisasi	% penataan organisasi kepegawaian yang dikelola dengan baik			100	Na			Na	Na	
			% dokumen organisasi kepegawaian yang dikelola dengan baik	100		100	100	100	100	100	
	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	% penataan organisasi kepegawaian yang dikelola			100	Na			Na	Na	100

		dengan baik									
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan analisis jabatan	1 dok		1 dok	1	100	1 dok	1 dok	100
	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah</i>	% Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah dengan baik			100	Na			Na	Na	
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah	1		1	1	100	1	1	100

			Daerah								
7.01.02	<b>PROGRAM PENYELENGGA RAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Tingkat Kinerja Seksi Pemerintah an Desa/Kelur ahan</b>			7	Na			Na	Na	
			<b>Capaian urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke camat</b>	100	100	100	100	100	100	100	100
7.01.02. 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	% penyelengga raan penunjang kesejahtera an			100	Na			Na	Na	

		masyarakat yang ditangani									
			% penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100		100	100	100	100	100	100
7.01.02. 2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	% Peningkatan Efektifitas kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan			100	Na			Na	Na	
			Jumlah lap Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan	6		6	6	100	6	6	100

			di Tingkat Kecamatan								
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	% penyelenggaraan penunjang kesejahteraan masyarakat yang ditangani			100	Na			Na	Na	
			Persentase PemDes yang lunas bayar PBB	75	100	75	72	96	75	75	100
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang	Persentase fasilitasi bidang kesejahteraan rakyat yang dikelola			100	Na			Na	Na	

	Dilimpahkan	dengan baik									
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 lap		1 lap	1	100	1 lap	1 lap	100
7.01.03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Tingkat Kinerja Seksi Kesejahteraan Rakyat			7	Na			Na	Na	
			<b>Persentase kontribusi dana desa/ kelurahan untuk pemberdayaan masyarakat</b>	100		100	100	100	100	100	100
			<b>Jumlah desa dengan</b>	3		3	3	100	3	3	100

			<b>swadaya masyarakat ≥ Rp. 20.000.000,-</b>								
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Lembaga Kesejahteraan Masyarakat desa/Kelurahan yang aktif			100	Na			Na	Na	
			% penyelenggaraan penunjang kesejahteraan masyarakat yang ditangani	100	100	100	100	100	100	100	100
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah	% Usulan forum Musrenbangcam yang diakomodir			70	Na			Na	Na	

	Perencanaan Pembangunan di Desa										
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7		7	7	100	7	7	100
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah	% Rekomendasi Hasil Pemeriksaan atas Penatausahaan APBDesa oleh APIP			100	Na			Na	Na	



		yang Ditindaklanjuti									
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas	23		23	23	100	23	23	100
7.01.04	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Tingkat Kinerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>			7	Na			Na	Na	
			<b>Cakupan penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban umum</b>	100	100	100	100	100	100	100	100
7.01.04. 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan	Persentase penyelesaian			100	Na			Na	Na	

	Ketenteraman dan Ketertiban Umum	n permasalahan Ketentaraman, Ketertiban dan Keindahan (K3)									
			Persentase penyelesaian permasalahan Ketentaraman dan Ketertiban umum	100	100	100	100	100	100	100	100
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan	Persentase penyelesaian permasalahan Ketentaraman,			100	Na			Na	Na	

	Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Ketertiban dan Keindahan (K3)									
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	23		23	23	100	23	23	100
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan	Persentase penyelesaian			100	Na			Na	Na	

	Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	permasalahan an Ketentaraman, Ketertiban dan Keindahan (K3)									
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sine rgi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau	23		23	23	100	23	23	100

			Kepolisian Negara Republik Ind								
7.01.04. 2.0201	Koordinasi/Siner gi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Persentase penyelesaia n permasalah an Ketentaram an, Ketertiban dan Keindahan (K3)			100	Na			Na	Na	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sine rgi dengan	23		23	23	100	23	23	100

			Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia								
7.01.05	<b>PROGRAM PENYELENGGA RAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Tingkat Kinerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>			7	Na			Na	Na	
			<b>Cakupan</b>	100		100	100	100	100	100	100

			<b>penyelenggara an urusan pemerintahan umum</b>								
7.01.05. 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	% Penyelengar aan Urusan Pemerintah an Umum			100	Na			Na	Na	
			Jumlah fasilitasi pembinaan wawasan kebangsaan	2		2	2	100	2	2	100
7.01.05. 2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan	Persentase kegiatan kemasyarak atan yang berwawasan kebangsaan			100	Na			Na	Na	

Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia											
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan	40		100	100	100	100	100	100



		dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

			Kesatuan Republik Indonesia								
7.01.06	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Tingkat Kinerja Seksi Kesejahteraan Rakyat</b>			7	Na			Na	Na	
			<b>Persentase desa dengan tata kelola pemerintah baik</b>	100	100	100	100	100	100	100	100
7.01.06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase pelaksanaan pembangunan seara swakelola			100	Na			Na	Na	
		Persentase			100	Na			Na	Na	

		penetapan APBdesa Tepat waktu									
			Rata-rata IKM Desa	70	100	70	70	100	70	70	100
7.01.06 2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase pelaksanaan pembangunan seara swakelola			100	Na			Na	Na	
		Persentase penetapan APBdesa Tepat waktu			100	Na			Na	Na	
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan	23			23	23	100	23	23	100

			Desa								
7.01.06 2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Persentase penetapan APBdesa Tepat waktu			100	Na			Na	Na	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	23		23	23	100	23	23	100
7.01.06 2.01.06	<i>Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa</i>		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	3		3	3	100	3	3	100

**Tabel 2.2**

Realisasi Kinerja dan Keuangan Kantor Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang  
Tahun 2022

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 2021	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022			Anggaran dan Realisasi Keuangan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022		
				Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Capaian Realisasi Kinerja (%)	Anggaran Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Capaian Realisasi Keuangan (%)
1	2	3	4	5	6= (5/4)* 100	7	8	9= (8/7)*1 00	
<b>KECAM</b>									

<b>ATAN SARAN G</b>													
<b>7</b>				<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>									
<b>7</b>	<b>1</b>			<b>KECAMATAN</b>							3.021.348.500	2.879.160.074	95
<b>7</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum</b>		100						
					<b>Persentase Ketercukupan Sarana dan Prasarana</b>		100						
					<b>Persentase Pemenuhan Pelayanan</b>		100						

						<b>Kepegawaian</b>						
						<b>Persentase Pemenuhan Pelayanan Keuangan</b>	100					
						<b>Persentase Keselarasan Perencanaan terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah</b>	100					
						<b>Persentase Informasi Yang Disampaikan Ke Publik</b>	100					
						<b>Nilai SAKIP OPD</b>		65	Na	<b>2.722.849.500</b>	<b>2.581.336.074</b>	100

7	1	1	02. 01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun		3					
						Jumlah Dokumen Laporan kinerja yang disusun		1					
						% Keselarasan Perencanaan terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah		100	100	<b>13.825.000</b>	<b>13.825.000</b> <b>0</b>	100	
7	1	1	02. 01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah dokumen Perencanaan		3 dok					



					<i>Perangkat Daerah</i>	Perangkat Daerah yang disusun							
							<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	2 dok	100	6.360.000	6.360.000	100	
7	1	1	02.01	2	<i>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>	Jumlah dokumen RKA yang disusun	2 dok						
							<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>	2 dok	100	3.590.000	3.590.000	100	

7	1	1	02. 01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan kinerja yang disusun		2 dok					
						Jumlah informasi yang disampaikan ke publik		3 info					
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 lap	100	3.875.000	3.875.000	100	
7	1	1	02. 02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas baik		4 dok					

							% Dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas baik		100	100	2.286.924.000	2.147.133.200	94
7	1	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas baik terkait pelayanan pembayaran gaji dan tunjangan ASN		1 dok					
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan		24 org	100	2.211.931.000	2.072.140.200	94

						ASN							
7	1	1	02. 02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas baik		2 lap					
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dok	100	69.993.000	69.993.00 0	100	
7	1	1	02. 02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen pelaporan keuangan akhir tahun		100					

					dengan kualitas baik						
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	100	5.000.000	5.000.000	100
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	% dokumen kepegawaian yang dikelola dengan baik		10 dok				

						<i>% Dokumen Kepegawaian yang dikelola dengan baik</i>		100	<b>100</b>			
					<i>Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>	<i>Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>	3	3	<b>100</b>	-		
7	1	1	02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	% pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran		100					
						% pemenuhan pelayanan umum		100	100	88.164.500	88.150.000	100

7	1	1	02. 06	1	<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor</i>	% pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran dalam pelayanan penerangan tempat kerja		100					
							<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pener angan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	12	100	5.037.650	5.037.650	100	
7	1	1	02. 06	3	<i>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</i>	% pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran dalam pemeliharaan		100					

					kebersihan lingkungan kantor							
						<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>		12	na	9.992.650	9.978.850	100
7	1	1	02.06	4	<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	% pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran dalam penyediaan bahan logistik kantor	100					
						<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang</i>		12	100	41.520.000	41.520.000	100



							<i>Disediakan</i>						
7	1	1	02. 06	5	<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	<i>% pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran</i>		100					
							<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>		12	100	8.613.900	8.613.900	100
					<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangund an</i>	<i>% pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran</i>		100					
							<i>Jumlah Paket Bahan bacaan dan peraturan</i>		12	100			

							<i>perundang - undangan yang Disediakan</i>						
7	1	1	02. 06	7	<i>Penyediaan Bahan/Material</i>	% pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran		100					
							<i>Jumlah Paket Bahan/Mater ial yang Disediakan</i>		12	na	14.000.300	13.999.60 0	100
7	1	1	02. 06	9	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	% pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran		100					
							<i>Jumlah Laporan Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan</i>		12	100	9.000.000	9.000.000	100

							<i>Konsultasi SKPD</i>						
7	1	1	02.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	% Ketercukupan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur		100					
						% Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur		12	100	170.000.000	169.179.000	100	
7	1	1	02.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	% Ketercukupan Peralatan mesin lainnya	100						
						<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin</i>		100	100	20.000.000	20.000.000	100	

							<i>lainnya yang Disediakan</i>						
7	1	1	02.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	% Ketercukupan Gedung Kantor dan bangunan lainnya		100					
							<i>Jumlah Paket gedung kantor atau bangunan lainnya yang Disediakan</i>	12	100	150.000.000	149.179.000	99	
7	1	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran							
						% Pemenuhan Pelayanan		12	100	<b>139.100.000</b>	<b>138.212.974</b>	99	

							Penunjang Perkantoran						
7	1	1	02. 08	2	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	% pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran		100					
							<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	12	100	9.000.000	8.262.974	92	
7	1	1	02. 08	3	<i>Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	% pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran		100					

							<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	100	100	1.000.000	1.000.000	100
7	1	1	02.08	4	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	% pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran		100				
							<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	5	100	129.100.000	128.950.000	100

7	1	1	02. 09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen pengelolaan BMD yang dikelola dengan baik		100				
							% BMD dengan kondisi Baik	1	100	20.316.000	20.315.90 0	100
7	1	1	02. 09	2	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	Jumlah dokumen pengelolaan BMD yang dikelola dengan baik						

							<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>	100			9.316.000	9.315.900	100
7	1	1	02. 09	6	<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	Jumlah dokumen pengelolaan BMD yang dikelola dengan baik		100	100	100			
							<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	100			4.000.000	4.000.000	100



7	1	1	02.09	10	<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	Jumlah dokumen pengelolaan BMD yang dikelola dengan baik		18 unit	100			
							<i>Jumlah sarana / prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi</i>	100		7.000.000	7.000.000	100
7	1	1	02.13		Penataan Organisasi	% penataan organisasi kepegawaian yang dikelola dengan baik		27 unit	100			

							% dokumen organisasi kepegawaian yang dikelola dengan baik	100				4.520.000	4.520.000	100
7	1	1	02.13	1	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan		% penataan organisasi kepegawaian yang dikelola dengan baik	100	1	100				
							Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	100				570.000	570.000	100
7	1	1	02.13	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah		% Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja		100	100				

					Pemerintah Daerah dengan baik							
						Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	100			3.950.000	3.950.000	100
7	1	2			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Tingkat Kinerja Seksi Pemerintahan Desa/Kelurahan</b>		1 dok	100			
						<b>Capaian urusan pemerintah</b>	100			<b>103.000.000</b>	<b>102.325.000</b>	99

						n yang dilimpahkan ke camat						
7	1	2	02. 01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	% penyelenggara an penunjang kesejahteraan masyarakat yang ditangani		1	100			
						% penyelenggar aan penunjang kesejahteraa n masyarakat yang ditangani				103.000.00 0	102.325.0 00	99
7	1	2	02. 01	2	<i>Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat</i>	% Peningkatan Efektifitas kegiatan pemerintahan di Tingkat		7				

				Kecamatan	Kecamatan							
						<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di wil kec</i>	100	100	100	12.200.000	11.525.000	94
7	1	2	02.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	% penyelenggaraan penunjang kesejahteraan masyarakat yang ditangani		100					
						Persentase PemDes yang lunas bayar PBB		100	100	90.800.000	90.800.000	100

7	1	2	02. 04	3	<i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan</i>	Persentase fasilitasi bidang kesejahteraan rakyat yang dikelola dengan baik								100				
							<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan</i>											
										6	100	90.800.000	90.800.00 0				100	
<b>7</b>	<b>1</b>	<b>3</b>			<b>PROGRAM PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<i>Tingkat Kinerja Seksi Kesejahteraan Rakyat</i>												

						<b>Persentase kontribusi dana desa/ kelurahan untuk pemberdayaan an masyarakat</b>	100	75	96	92.725.000	92.725.000	100
						<b>Jumlah desa dengan swadaya masyarakat ≥ Rp. 20.000.000,-</b>	100					
7	1	3	02. 01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	<b>Persentase Lembaga Kesejahteraan Masyarakat desa/ Kelurahan yang aktif</b>			1 lap	100			

						% penyelenggaraan penunjang kesejahteraan masyarakat yang ditangani	7			92.725.000	92.725.000	100
7	1	3	02.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	% Usulan forum Musrenbangcam yang diakomodir		100	100			
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam		3	100	24.575.000	24.575.000	100



							<i>Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa</i>						
7	1	3	02. 01	3	<i>Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>	<i>% Rekomendasi Hasil Pemeriksaan atas Penatausahaan APBDesa oleh APIP yang Ditindaklanjuti</i>		100					
							<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas</i>	100	100	100	68.150.000	68.150.000	100
<b>7</b>	<b>1</b>	<b>4</b>			<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN</b>	<i>Tingkat Kinerja Seksi Ketentraman</i>		70					

				<b>DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<i>dan Ketertiban Umum</i>							
						<b>Cakupan penyelengga raan urusan ketentraman dan ketertiban umum</b>		7	100	50.540.000	50.540.000	100
7	1	4	02. 01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	<b>Persentase penyelesaian permasalahan Ketentarama n, Ketertiban dan Keindahan (K3)</b>		100					
						Persentase penyelesaian permasalaha n		23	100	50.540.000	49.040.000	97

							Ketentaraman dan Ketertiban umum						
7	1	4	02.01	1	<i>Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>	Persentase penyelesaian permasalahan Ketentaraman, Ketertiban dan Keindahan (K3)		7					
							<i>Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik</i>	100	100	100	49.040.000	49.040.000	100

						<i>Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>						
7	1	4	02.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase penyelesaian permasalahan Ketentaraman, Ketertiban dan Keindahan (K3)		100					
						Persentase penyelesaian permasalahan Penegakan	100	100	100	1.500.000	1.500.000	100

							Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah						
7	1	4	02.02	1	<i>Koordinasi/ Siner gi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia</i>	Persentase penyelesaian permasalahan Ketentaraman, Ketertiban dan Keindahan (K3)		100					

						<i>Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Ind</i>		23	100	1.500.000	1.500.000	100
7	1	5			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<i>Tingkat Kinerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum</i>		100				

						<b>Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum</b>		23	100	<b>20.234.000</b>	<b>20.234.000</b>	100
7	1	5	02.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	% <b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>		100				
						Jumlah fasilitasi pembinaan wawasan kebangsaan		23	100	20.234.000	20.234.000	100
7	1	5	02.01	1	<i>Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka</i>	Persentase kegiatan masyarakat yang berwawasan kebangsaan		7				





*Wawasan  
Kebangsaan  
dan  
Ketahanan  
Nasional  
dalam  
rangka  
Memantapkan  
Pengamalan  
Pancasila,  
Pelaksanaan  
Undang-  
Undang  
Dasar Negara  
Republik  
Indonesia  
Tahun 1945,  
Pelestarian  
Bhinneka  
Tunggal Ika  
serta*

							<i>Pemertahana dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia</i>					
7	1	6			<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Tingkat Kinerja Seksi Kesejahteraan Rakyat</b>		100				
						<b>Persentase desa dengan tata kelola pemerintah baik</b>		2	100	32.000.000	32.000.000	100
7	1	6	02.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi	Persentase pelaksanaan pembangunan		100				

					Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	seara swakelola						
						Persentase penetapan APBdesa Tepat waktu		40	100			
						Rata-rata IKM Desa	7			32.000.000	32.000.000	100
7	1	6	02.	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase pelaksanaan pembangunan seara swakelola	100	100	100			
						Persentase penetapan APBdesa Tepat waktu	100					

							<i>Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa</i>	100			12.000.000	12.000.000	100
7	1	6	02.01	5	<i>Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa</i>	Persentase penetapan APBdesa Tepat waktu		100	70	100			
							<i>Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala</i>	100	23	100	5.000.000	5.000.000	100

							<i>Desa dan Perangkat Desa</i>						
7	1	6	02.01	6	<i>Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa</i>		<i>Jumlah Dokumen Fasilitasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Kepala Desa dan Perangkat Desa</i>	100	3	100	15.000.000	15.000.000	100

Dari data sebagaimana tabel 2.1 dan diperjelas dengan tabel 2.2 dan tersebut di atas, Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022 Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut :

- 1) Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022 sampai dengan Semester Dua Tahun 2022 Kantor Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang
  - a) Dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan telah dilaksanakan 1 urusan, 6 program dengan 7 indikator kinerja program, dan 15 kegiatan dengan 15 indikator kinerja kegiatan.
  - b) Dari 7 indikator kinerja program mencapai target
  - c) Dari 15 indikator kinerja kegiatan tercapai target.
- 2) Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2016-2021 sampai dengan Semester Satu Tahun 2022 Kantor Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang
  - a) Dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan telah dilaksanakan 1 urusan, 6 program dengan 7 indikator kinerja program, dan 15 kegiatan dengan 15 indikator kinerja kegiatan.
  - b) Dari 7 indikator kinerja program mencapai target
  - c) Dari 15 indikator kinerja kegiatan tercapai target.

## **2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN KANTOR KECAMATAN SARANG KABUPATEN REMBANG**

Penyelenggaraan pelayanan Kantor Kecamatan Sarang adalah melaksanakan fungsi pelayanan yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Bupati Rembang Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan

Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rembang.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Kantor Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Kantor Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan capaian indikator urusan penunjang Pemerintahan sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 2.3**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama Kantor Kecamatan Sarang Kab. Rembang**

NO	Indikator Tujuan/Sasaran Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
		2021	2022	2023	2024	Tahun 2021	Tahun 2022	tahun 2023	tahun 2024	
	<b>Renstra 2020-2021</b>									
	Indeks Kepuasan Masyarakat	82				81,88				
	<b>Renstra 2021-2026</b>									
	Indeks Kepuasan Masyarakat / IKM		82,5	<b>82</b>	<b>82,5</b>	81,88	82,5	82,75	83	

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Kantor Kecamatan Sarang sampai dengan semester satu tahun 2022 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

a. Tujuan

Meningkatnya kualitas Pelayanan Kecamatan. Dalam upaya mencapai Tujuan tersebut memiliki indikator kinerja yaitu :

1. Target Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Sarang tahun 2022 yaitu 82,5 tercapai 100%
2. Target Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Sarang tahun 2023 yaitu 82,75 dan
3. Target Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Sarang tahun 2024 yaitu 83

b. Sasaran

Meningkatnya kualitas Pelayanan Kecamatan selaras dengan RPJMD dengan indikator kinerja Yaitu :

Indeks Kepuasan Masyarakat. Tahun 2022 target Kecamatan Sarang 82,5 terealisasi 82,5 terealisasi 100%

### **2.3 Isu - Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang**

A. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Kantor Kecamatan Sarang yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah. Tingkat kinerja Kantor Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang dapat dilihat berdasarkan capaian indikator urusan yang menjadi tujuan / sasaran strategis dan program sebagaimana pada tabel 2.1. tabel. 2.2 dan tabel 2.3 secara umum kinerja Kantor Kecamatan Sarang tergolong baik dikarenakan mampu memenuhi target capaian indikator yang telah ditetapkan.



B. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah; Untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Sarang maka diperlukan tentang potret Kecamatan Sarang saat ini. Adapun potret dan permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Sarang adalah sebagai berikut :

## **1. Bidang Pemerintahan**

### **a. Kondisi**

1. Belum optimalnya pelaksanaan Standar Pelayanan Kecamatan
2. Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia perangkat desa
3. Belum efektifnya pengawasan melekat
4. Kurang validnya data yang mendukung perencanaan program pembangunan di wilayah kecamatan
5. Rendahnya kualitas dan akurasi data yang ada di desa
6. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam masalah hukum

**b. Permasalahan**

1. Belum optimalnya pelaksanaa pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.
2. Belum memadainya Sarana prasarana penyelenggaraan pelayanan PATEN .
3. Kualitas sumber daya manusia pemerintah desa belum merata.
4. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan Sistem Informasi Desa secara berkala dan terintegrasi.
5. Belum adanya sistem penyediaan basis data kependudukan yang terintegrasi antara desa dan kecamatan.
6. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat.

1. **Bidang Ekonomi**

**a. Kondisi Ekonomi**

1. Menurunnya daya dukung potensi sumber daya alam.
2. Pemberdayaan kelompok pelaku usaha masih rendah.
3. Banyaknya produk UKM yang belum mampu bersaing dengan produk luar ( kualitas dan kuantitas).
4. Penjualan hasil pertanian belum optimal.
5. Potensi industri kecil terutama hasil laut.
6. Potensi budidaya hasil laut.

**b. Permasalahan**

1. Minat pemuda terhadap pertanian semakin menurun
2. Belum optimalnya pendayagunaan sumber daya manusia dan kelembagaan pendukung pemberdayaan masyarakat
3. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi dalam

pengembangan ekonomi pedesaan antar pemerintah desa dengan perangkat daerah maupun stake holder/pelaku usaha

4. Belum adanya validasi data potensi pertanian maupun Industri rumahan secara berkala baik di desa maupun tingkat Kecamatan.

## **2. Bidang Fisik dan Sarana Prasarana**

### **a. Kondisi Saat ini**

1. Masih adanya beberapa ruas jalan yang belum memadai sebagai fasilitas penghubungan antar desa maupun kecamatan
2. Sebagian Desa termasuk kategori daerah rawan kekeringan

### **b. Permasalahan**

1. Diperlukan pelebaran jalan, normalisasi dan perbaikan geometri jalan terutama di daerah perbatasan
2. Masih terbatasnya sarana prasarana pengolahan air.
3. Masih banyak jalan lingkungan dan desa dengan kondisinya belum memadai

## **4. Bidang Sosial Budaya**

### **a. Kondisi Saat Ini**

1. Masih tingginya jumlah rumah tangga miskin
2. Masih banyaknya pengangguran
3. Masih terbatasnya Lapangan Kerja.
4. Masih adanya sarana prasarana sekolah yang kurang memadai
5. Masih banyaknya kasus penyakit menular;
6. Masih adanya kasus gizi buruk
7. Adanya beberapa desa yang memiliki potensi seni / Pathol

8. Masih rendahnya tingkat SDM di Kecamatan Sarang

**b. Permasalahan**

1. Masih tingginya jumlah rumah tangga miskin
2. Masih banyaknya angka pengangguran di Kecamatan Sarang
3. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam upaya penyehatan lingkungan dan PHBS.
4. Rendahnya minat Generasi muda dalam berwirausaha.
5. Masih rendahnya tingkat Pendidikan di Masyarakat.

C. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional.

Dampak yang dapat muncul sebagai akibat dari permasalahan diatas diantaranya tercantum dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 2.4**

**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Kecamatan Sarang yang Mempengaruhi Pencapaian Visi Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

<b>No</b>	<b>Faktor Pendorong</b>	<b>Faktor Penghambat</b>	<b>Ket.</b>
1	Eksistensi keberadaan Kantor Kecamatan Sarang sebagai tempat penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public	Sarana dan Prasarana Infastruktur pelayanan publik yang kurang memadai	

No	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Ket.
2	Penetapan perda rencana tata ruang dan wilayah sebagai pedoman guna mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor dan ruang wilayah yang merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha	Rendahnya kesadaran akan arti pentingnya penataan ruang dan pemanfaatan ruang sesuai Perda RTRW yang ditetapkan	
3	Pendelegasian kewenangan Bupati kepada Camat dalam Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan ( PATEN )	Keterbatasan SDM aparatur dan infrastruktur Sarpras penunjang pelayanan	
4	<i>Sustainable devolepment</i> (pembangunan berkelanjutan)	Kuranginya pemahaman masyarakat dan dunia usaha dalam menjaga kelestarian alam dan lingkungan	
5	Pengembangan potensi pertanian dan perkebunan	Kuranginya pembinaan dan pendampingan dalam pengolahan hasil pertanian dan perkebunan	
6	Ketahanan pangan dan	Perubahan alih fungsi	

No	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Ket.
	energy	lahan	

D. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah

Dalam rangka meningkatkan pengembangan pelayanan pada Kantor Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang, diperlukan suatu analisa faktor-faktor yang dapat mendukung dan mempengaruhi keberhasilan serta kegagalan strategi kebijakan, baik analisa tantangan maupun peluang yang dihadapi Kantor Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang, antara lain :

Berdasarkan evaluasi kinerja Kecamatan Sarang serta upaya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat guna mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governace*) dan pemerintahan yang *bersih* (*clean governance*) serta berdasarkan hasil analisis terhadap laporan akuntabilitas kinerja pemerintah Kecamatan Sarang Tahun 2021, maka dapat dikemukakan beberapa tantangan dan peluang Kecamatan Sarang kurun lima tahun mendatang sebagai berikut :

**a. Tantangan**

1. Tingginya tuntutan masyarakat terhadap aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat
2. Dinamika perkembangan masyarakat dilain daerah secara tidak langsung berpengaruh terhadap pola pikir dan persepsi masyarakat.

3. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat, menuntut adanya pemahaman dan penyesuaian dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat
4. Masih rendahnya penguasaan teknologi bagi Perangkat Desa dan Koordinasi dengan Perangkat Desa belum bisa optimal
5. Jumlah desa yang harus dilayani cukup banyak ( 23 desa)
6. Peningkatan Kualitas aparatur kecamatan dan pemerintah desa dalam implementasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Perkembangan ekonomi global yang sangat cepat seperti Pelaksanaan Era perdagangan bebas Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang perlu dipersiapkan dan diantisipasi sejak dini oleh masyarakat;
8. Masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran
9. Rendahnya partisipasi dan peranserta masyarakat dalam pembangunan
10. Tuntutan transparansi dan akuntabilitas kinerja Perangkatan daerah.

**b. Peluang**

1. Pelaksanaan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, serta pelimpahan Kewenangan dari pemerintah dan pemerintah daerah/Bupati yang didelegasikan kepada Camat
2. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Pemberian otonomi yang luas disertai dukungan pendanaan dari APBD melalui ADD kepada pemerintah desa untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan, pelayanan umum, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan masyarakat dan ketentraman dan ketertiban umum;

4. Dukungan pendanaan dari pemerintah daerah untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kecamatan;
5. Semakin meningkatnya anggaran Pemerintah yang dialokasikan kepada Desa baik berupa Dana Desa maupun dana lainnya.

#### E. Isu Isu Strategis

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Sarang adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa serta melaksanakan tugas yang di limpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten, karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Pada Dokumen RPJMD Kabupaten Rembang tahun 2021-2026 terdapat 7 (tujuh) isu strategis yaitu (1) Perlunya Penguatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, (2) Kualitas Sumber Daya Manusia yang belum memiliki daya saing yang optimal serta pelayanan dasar yang masih memerlukan peningkatan, (3) Belum optimalnya pengendalian tata ruang dan perlunya pemantaban penyediaan infrastruktur, serta rendahnya ketersediaan air baku, (4) Perlunya penguatan inovasi dan daya saing nilai



tambah produksi pada sektor perekonomian, (5) Masih tingginya angka kemiskinan, (6) Meningkatnya ancaman krisis akibat perubahan iklim dan penyakit menular (wabah, epidemi, dan pandemi) dan (7) Perlunya penguatan kemandirian desa.

Dari ketujuh isu strategis tersebut yang terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan Sarang adalah isu strategis pertama dan ketujuh yaitu “ **Perlunya Penguatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Perlunya penguatan kemandirian desa.**

Terdapat permasalahan/kendala atau isu-isu yang harus mendapatkan penanganan. Maka perumusan isu strategis di Kecamatan Sarang tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Perlunya peningkatan kualitas pelayanan publik;
2. Perlunya peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

#### **2.4 Review terhadap RKPD**

Tahun 2024 masih dalam tahun pelaksanaan RPJPD Kabupaten Rembang tahun 2005-2025. RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 berakhir pada tahun 2021. Sehingga dalam penyusunan Dokumen RKPD tahun 2024 berpedoman pada Dokumen RPJPD 2005-2025.

Arah kebijakan pembangunan tahun 2024 ditujukan untuk “Melaksanakan Reformasi Birokrasi Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Mengembangkan Kebijakan Pengelolaan Pemerintahan Yang Efektif dan Efisien” dan “Meningkatkan Pembangunan Manusia Yang Berdaya Saing Melalui

Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Secara Adil dan Merata” dengan fokus pembangunan diarahkan pada:

- a. Tata kelola pemerintahan
- b. Pendidikan
- c. Kesehatan
- d. Peningkatan perekonomian
- e. Infrastruktur daerah
- f. Kualitas lingkungan hidup
- g. Kemiskinan
- h. Pengangguran
- i. Kemandirian desa

Review terhadap RKPD Kabupaten Rembang sebagaimana dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 memuat tentang perbandingan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan Kantor Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang untuk tahun anggaran 2023. Selain itu review juga berisikan penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan dan catatan penting. Pagu indikatif dalam Rancangan awal diisi berdasarkan berdasarkan matrik indikasi rencana program dan pendanaan Bab VII RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026. Rincian review dimuat berdasarkan format tabel T-C.31 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut :

Tabel 2.5  
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024  
Kabupaten Rembang

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Sarang

KODE	Rancangan Awal RKPD					Hasil analisa Kebutuhan					Ca t.P en tin g
	Urusan/Bidan g Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Loka si	Indikato r Kinerja	Targ et Capa ian	Pagu Indikatif	Urusan/Bidan g Urusan Pemerintaha n Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Loka si	Indika tor Kinerj a	Targ et Capa ian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6	12
7	<b>UNSUR KEWILAYAHA N</b>	Kec. Sara ng			<b>2.967.660.410</b>	<b>UNSUR KEWILAYAHA N</b>	Kec. Sara ng			<b>2.967.660.410</b>	
7 1	<b>KECAMATAN</b>				<b>2.967.660.410</b>	<b>KECAMATAN</b>				<b>2.967.660.410</b>	

7	1	1		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	Kec. Sarang	<b>NILAI SAKIP OPD</b>	<b>69</b>	<b>2.555.183.410</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	Kec. Sarang	<b>NILAI SAKIP OPD</b>	<b>64,86</b>	<b>2.555.183.410</b>	
7	1	1	02.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Kec. Sarang	<b>% Keselarasan Perencanaan terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>100</b>	<b>30.000.000</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Kec. Sarang	<b>% Keselarasan Perencanaan terhadap Capaian Kinerja</b>	<b>100</b>	<b>30.000.000</b>	

											<b>Peran gkat Daera h</b>				
7	1	1	02. 01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Sara ng	Jumlah Dokume n Perenca naan Perangk at Daerah)	2	15.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Sara ng	Jumla h Doku men Perenc anaan Perang kat Daera h)	2	15.000.000	
7	1	1	02. 01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec. Sara ng	Jumlah Dokume n RKA- SKPD dan	2	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec. Sara ng	Jumla h Doku men RKA-	2	5.000.000	

						Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				
7	1	1	02.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Sarang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7	10.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Sarang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	7	10.000.000

7	1	1	02. 02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Kec. Sara ng	% <b>Dokume n pelapor an keuanga n dengan kualitas baik</b>	<b>100</b>	2.069.373.100	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Kec. Sara ng	% <b>Doku men pelapo ran keuan gan denga n kualit as baik</b>	<b>100</b>	2.069.373.100	
7	1	1	02. 02	1	Penyediaan Gaji dan	Kec. Sara	Jumlah Orang	19	1.994.473.100	Penyediaan Gaji dan	Kec. Sara	Jumla h	19	1.994.473.100	

					Tunjangan ASN	ng	yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			Tunjangan ASN	ng	Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				
7	1	1	02.	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kec. Sarang	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	12	69.900.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kec. Sarang	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	12	69.900.000		



						n SKPD				Keuan gan SKPD			
7	1	1	02.	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuanga n Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordin asi Penyusu nan Laporan Keuanga n Akhir	2	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Sara ng	Jumla h Lapora n Keuan gan Akhir Tahun SKPD dan Lapora n Hasil Koordi nasi Penyu sunan	2	5.000.000

						Tahun SKPD					Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				
7	1	1	02.05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Kec. Sarang	% <b>Dokumen Kepegawaian yang dikelola dengan baik</b>	<b>100</b>	8.150.000	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Kec. Sarang	% <b>Dokumen Kepegawaian yang dikelola dengan baik</b>	<b>100</b>	8.150.000	
7	1	1	02.05	3	Pendataan dan	Kec. Sara	Jumlah Dokume	3	8.150.000	Pendataan dan	Kec. Sara	Jumla h	3	8.150.000	

					Pengolahan Administrasi Kepegawaian	ng	n			Pengolahan Administrasi Kepegawaian	ng	Doku men Pendat aan dan Pengol ahan Admini strasi Kepeg awaian			
7	1	1	02. 06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Kec. Sarang	% <b>Pemenuhan Pelayanan Umum</b>	<b>100</b>	127.974.310	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Kec. Sarang	% <b>Pemenuhan Pelayanan Umum</b>	<b>100</b>	127.974.310	
7	1	1	02. 06	1	Penyediaan Komponen	Kec. Sara	Jumlah Paket	12	6.450.000	Penyediaan Komponen	Kec. Sara	Jumla h	12	6.450.000	

					Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	ng	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	ng	Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
7	1	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Sara ng	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkap	12	15.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Sara ng	Jumlah Paket Peralatan dan	12	15.000.000	

						apan Kantor yang Disediakan					Perlen gkapa n Kantor yang Disedi akan			
7	1	1	02. 06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralata n Rumah Tangga yang Disediakan	Kec. Sara ng	12	14.500.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumla h Paket Peralat an Ruma h Tangg a yang Disedi akan	Kec. Sara ng	12	14.500.000

7	1	1	02. 06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Sara ng	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediak an	12	46.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Sara ng	Jumla h Paket Bahan Logisti k Kantor yang Disedi akan	12	46.000.000
7	1	1	02. 06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. Sara ng	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengan daan yang Disediak	12	8.024.310	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. Sara ng	Jumla h Paket Baran g Cetaka n dan Penga ndaan	12	8.024.310

						an					yang Disedi akan				
7	1	1	02. 06	7	Penyediaan Bahan/Materi al	Kec. Sara ng	Jumlah Paket Bahan/ Material yang Disediak an	12	18.000.000	Penyediaan Bahan/Materi al	Kec. Sara ng	Jumla h Paket Bahan /Mater ial yang Disedi akan	12	18.000.000	
7	1	1	02. 06	9	Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Sara ng	Jumlah Laporan Penyelen ggaraan Rapat Koordin asi dan	12	20.000.000	Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Sara ng	Jumla h Lapora n Penyel enggar aan	12	20.000.000	

						Konsultasi SKPD					Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
7	1	1	02.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Kec. Sarang	<b>% Ketercukupan Sarana Prasarana Aparatur</b>	<b>100</b>	95.000.000	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Kec. Sarang	<b>% Ketercukupan Sarana Prasarana Aparatur</b>	<b>100</b>	95.000.000
7	1	1	02.07	5	Pengadaan Mebel	Kec. Sara	Jumlah Unit	3	75.000.000	Pengadaan Mebel	Kec. Sara	Jumlah Unit	3	75.000.000



						ng mebelair yang Disediak an				ng mebela ir yang Disedi akan				
7	1	1	02. 07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Sara ng	Jumlah Unit Peralata n dan Mesin Lainnya yang disediak an	4	20.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Sara ng	Jumla h Unit Peralat an dan Mesin Lainny a yang disedia kan	4	20.000.000
7	1	1	02. 08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Kec. Sara ng	<b>% Pemenu han Pelayan an Adminis</b>	<b>100</b>	160.600.000	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah</b>	Kec. Sara ng	<b>% Peme nuhan Pelaya nan Admin</b>	<b>100</b>	160.600.000

						<b>trasi Perkant oran</b>					<b>istrasi Perka ntoran</b>			
7	1	1	02. 08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyedia an Jasa Komuni kasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediak an	Kec. Sara ng	12	15.200.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumla h Lapora n Penyed iaan Jasa Komu nikasi, Sumbe r Daya Air dan Listrik yang Disedi	Kec. Sara ng	12	15.200.000

											akan			
7	1	1	02.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Sarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	5.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Sarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	5.000.000

7	1	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Sarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	140.400.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Sarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	140.400.000
7	1	1	02.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan</b>	Kec. Sarang	<b>% BDM Dengan Kondisi Baik</b>	<b>100</b>	<b>64.086.000</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan</b>	Kec. Sarang	<b>% BDM Dengan Kondisi</b>	<b>100</b>	<b>64.086.000</b>

					<b>Pemerintahan Daerah</b>				<b>Pemerintahan Daerah</b>		<b>di Baik</b>				
7	1	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas atau Dinas Jabatan	Kec. Sara ng	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajakny	18	22.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Sara ng	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibaya	18	22.000.000	

						a					rkan Pajakn ya			
7	1	1	02. 09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Sara ng	Jumlah Peralata n dan Mesin Lainnya yang Dipeliha ra	27	7.086.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Sara ng	Jumla h Peralat an dan Mesin Lainny a yang Dipelih ara	27	7.086.000
7	1	1	02. 09	9	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Sara ng		1	15.000.000	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Sara ng		1	15.000.000

7	1	1	02.	1	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Sara ng	Jumlah sarana / prasara na Gedung Kantor dan Bangun an Lainnya yang Dipeliha ra/Direh abilitasi	2	20.000.000	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Sara ng	Jumla h sarana / prasar ana Gedun g Kantor dan Bangu nan Lainny a yang Dipelih ara/Di rehabil itasi	2	20.000.000
---	---	---	-----	---	---	--------------------	--	---	------------	---	--------------------	--	---	------------

7	1	2		<b>PROGRAM PENYELENGG ARAAN PEMERINTAH AN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Kec. Sara ng</b>	<b>Capaian urusan pemerin tahan yang dilimpa hkan ke camat</b>	<b>100</b>	<b>25.000.000</b>	<b>PROGRAM PENYELENGG ARAAN PEMERINTAH AN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Kec. Sara ng</b>	<b>Capaian n urusa n pemer intaha n yang dilimp ahkan ke camat</b>	<b>100</b>	<b>25.000.000</b>
7	1	2	02. 01	<b>Penyelenggar aan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat</b>	<b>Kec. Sara ng</b>	<b>% Penyele nggaraa n Kegiata n Pemerin tahan di</b>	<b>6</b>	<b>15.800.000</b>	<b>Penyelenggar aan Urusan Pemerintaha n yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat</b>	<b>Kec. Sara ng</b>	<b>% Penyel enggar aan Kegiat an Pemer intaha</b>	<b>6</b>	<b>15.800.000</b>



					<b>Daerah yang Ada di Kecamatan</b>	<b>Tingkat Kecamatan</b>			<b>Daerah yang Ada di Kecamatan</b>	<b>n di Tingkat Kecamatan</b>				
7	1	2	02.01	2	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Sarang	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	<b>80</b>	15.800.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Sarang	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada	<b>80</b>	15.800.000

						Kecamat an					Masya rakat di Wilaya h Kecam atan			
7	1	2	02. 04		<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	Kec. Sara ng	<b>Persent ase PemDes yang lunas bayar PBB</b>	1	<b>9.200.000</b>	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintah n yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	Kec. Sara ng	<b>Persen tase PemD es yang lunas bayar PBB</b>	1	<b>9.200.000</b>
7	1	2	02. 04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait	Kec. Sara ng	Jumlah Laporan Pelaksana an	<b>100</b>	9.200.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait	Kec. Sara ng	Jumla h Lapora n	<b>100</b>	9.200.000

			dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			
7	1	3	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Kec. Sarang <b>% Kontribusi dana desa/ kelurahan untuk pemberdayaan masyarakat</b>	<b>3</b>	190.827.000	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Kec. Sarang <b>% Kontribusi dana desa/ kelurahan untuk pemberdayaan</b>	<b>3</b>	190.827.000



						ng kesejahteraan masyarakat yang ditangani					jang kesejahteraan masyarakat yang ditangani			
7	1	3	02. 01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Sarang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyaw	23	40.000.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Sarang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipas	23	40.000.000

						arah Perencanaan Pembangunan di Desa					i dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			
7	1	3	02.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Sarang	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberd	<b>100</b>	150.827.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Sarang	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas	<b>100</b>	150.827.000

						ayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
7	1	4		<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Kec. Sarang	<b>Cakupan penyelenggaraan urusan ketentr</b>	<b>100</b>	39.450.000	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Kec. Sarang	<b>Cakupan penyelenggaraan urusan</b>	<b>100</b>	39.450.000

						aman dan ketertiban umum					ketenteraman dan ketertiban umum			
7	1	4	02.01	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	Kec. Sarang	% <b>Penyelesaian permasalahan Ketenteraman dan Ketertiban umum</b>	23	39.450.000	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	Kec. Sarang	% <b>Penyelesaian permasalahan Ketenteraman dan Ketertiban umum</b>	23	39.450.000	



7	1	4	02.	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Sara ng	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di	39.450.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Sara ng	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan Instansi Vertikal	39.450.000
---	---	---	-----	---	---	--------------	--	------------	---	--------------	--	------------

					Wilayah Kecamat an				Indone sia dan Instan si Vertik al di Wilaya h Kecam atan			
7	1	5		<b>PROGRAM PENYELENGG ARAAN URUSAN PEMERINTAH AN UMUM</b>	<b>Cakupa n penyele nggaraa n urusan pemerin tahan</b>	<b>100</b>	44.000.000	<b>PROGRAM PENYELENGG ARAAN URUSAN PEMERINTAH AN UMUM</b>	<b>Cakup an penyel enggar aan urusa n pemer</b>	<b>100</b>	44.000.000	

						umum				intaha n umum			
7	1	5	02. 01		<b>Penyelenggara aan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>Jumlah fasilitas i pembina aan wawasa n kebangs aan</b>	<b>2</b>	<b>44.000.000</b>	<b>Penyelenggara aan Urusan Pemerintaha n Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>Jumla h fasilit asi pemb inaan wawas an keban gsaan</b>	<b>2</b>	<b>44.000.000</b>	
7	1	5	02. 01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengiku ti Pembina	100	44.000.000	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumla h Orang yang Mengi kuti	100	44.000.000	

				dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan	an Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-					dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan	Pembi naan Wawasan Keban gsaan dan Ketaha nan Nasion al dalam rangka Mema ntapka n Penga malan Pancas			
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	---	--	--	--

				Negara Kesatuan Republik Indonesia	Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan			Negara Kesatuan Republik Indonesia	ila, Pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka		
--	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	------------------------------------	---	--	--

						n Negara Kesatua n Republik Indonesi a					Tungg al Ika serta Pemert ahana n dan Pemeli haraa n Keutu han Negara Kesatu an Republ ik Indone sia			
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	---	--	--	--

7	1	6			<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>		<b>% Desa dengan tata kelola pemerintahan baik</b>	<b>100</b>	113.200.000	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>		<b>% Desa dengan tata kelola pemerintahan baik</b>	<b>100</b>	113.200.000	
7	1	6	02.01		<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>		<b>Rata-rata IKM Desa</b>	<b>75</b>	113.200.000	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>		<b>Rata-rata IKM Desa</b>	<b>75</b>	113.200.000	
7	1	6	02.01	2	Fasilitasi Administrasi		Jumlah Dokume	23	15.000.000	Fasilitasi Administrasi		Jumla h	23	15.000.000	

					Tata Pemerintahan Desa	n yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa			Tata Pemerintahan Desa	Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa			
7	1	6	02.01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka	23	50.000.000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasili	23	50.000.000	



						Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				tasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			
7	1	6	02.01	5	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam	23	43.200.000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat	Jumlah Dokumen Fasilitas	23	43.200.000	

					Desa		rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa			Desa		asi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa		
7	1	6	02.01	6	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa		Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan	1	-	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa		Jumlah Dokumen Fasilitas dalam	1	-

						aan Pemiliha n Kepala Desa					rangka Pelaks anaan Pemili han Kepala Desa			
7	1	6	02. 01	8	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentia n Perangkat Desa	Jumlah Dokume n Rekome ndasi Pengang katan dan Pemberh entian Perangk at Desa	23	-	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentia n Perangkat Desa	Jumla h Doku men Rekom endasi Penga ngkata n dan Pembe rhenti an	23	-		



## 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Secara umum, Rencana Kerja RKPD Kabupaten Rembang tahun 2024 telah menggambarkan kebutuhan pendanaan program dan kegiatan Kantor Kecamatan Sarang pada tahun 2024. Meskipun demikian, pada tahap perencanaan selanjutnya dapat terjadi dinamika perubahan program dan kegiatan karena adanya penyesuaian terhadap kebijakan atau regulasi yang baru yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 050-3889 tahun 2021 tentang Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi, Klasifikasi, kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah, atau terdapat penyesuaian pada saat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) pada sisi legislatif, di mana program dan kegiatan perlu mengakomodir aspirasi dari masyarakat.

Tabel 2.6

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan  
Tahun 2024 Pemerintah kabupaten Rembang

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten / Kota	Kantor Kecamatan Sarang	Nilai Sakip OPD		

A.1	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		% pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran		
A.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	108.000.000	

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN KANTOR KECAMATAN SARANG KABUPATEN REMBANG**

#### **3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah**

Prioritas Pembangunan Tahun 2024 Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down, holistik-tematik, integratif, dan spasial. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan. Oleh karena itu perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Rembang Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada prioritas pembangunan nasional dan provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.

##### **3.1.1 Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2024**

Tahun 2024 masih dalam tahun pelaksanaan RPJPD Kabupaten Rembang tahun 2005-2025. Saat ini proses penyusunan Dokumen RKPD Tahun 2024 mengacu pada RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026

Visi RPJMD Kabupaten Rembang tahun 2021-2026 adalah:

**“Rembang Gemilang 2026”**

Visi Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 akan ditempuh melalui lima (5) misi pembangunan yaitu:

1. Mengembangkan profesionalisasi, modernisasi organisasi dan tata kerja birokrasi;
2. Mengembangkan sumber daya manusia yang semakin berkualitas dan terproteksi dalam jaminan sosial;
3. Membangun infrastruktur dan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan;
4. Mengembangkan Kemandirian Desa berbasis Potensi Lokal

Upaya untuk pencapaian perwujudan visi dan misi pembangunan Kabupaten Rembang, dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Sebagai landasan implementasi RKPD tahun 2024 maka tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2024 yang akan diwujudkan sebagaimana tertuang pada RPJPD Kabupaten Rembang 2005-2025

Arah kebijakan pembangunan tahun 2024 ditujukan untuk “Melaksanakan Reformasi Birokrasi melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Mengembangkan Kebijakan Pengelolaan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien” dan “Mewujudkan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan dengan Mendukung Percepatan Pembangunan Ekonomi” dengan fokus pembangunan diarahkan pada :

a. Tata kelola pemerintahan

b. Pendidikan



- c. Kesehatan
- d. Peningkatan perekonomian
- e. Infrastruktur daerah
- f. Kualitas lingkungan hidup
- g. Kemiskinan
- h. Pengangguran
- i. Kemandirian desa

### **3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kantor Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang**

#### **3.3.1 Tujuan**

Tujuan jangka menengah yang akan dicapai oleh Kantor Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang dalam rangka pencapaian visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026, adalah Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik.

Tujuan tersebut selaras dengan tujuan yang melekat dalam misi pertama RPJPD Kabupaten Rembang Tahun 2005-2025 yaitu mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Tujuan sebagaimana tersebut berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan Sarang seperti yang tertuang dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.

#### **3.3.2 Sasaran**

Adapun untuk mencapai tujuan tersebut Bappeda Kabupaten Rembang menetapkan sasaran jangka

menengah yang akan dicapai oleh Kantor Kecamatan Sarang dalam rangka pencapaian tujuan Kantor Kecamatan Sarang selama tahun 2021 – 2026 yaitu “ Meningkatkan kualitas pelayanan Kecamatan “

Tujuan dan sasaran jangka menengah Kantor Kecamatan Sarang tahun 2021 – 2026, dapat dijabarkan sebagaimana pada Tabel 3.1 sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah**  
**Kantor Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang**  
**Tahun 2021-2026**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	Satuan	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Meningkatkan kualitas pelayanan Publik		Indeks Pelayanan Publik /IPP	Angka	Na	Na	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5
		Meningkatnya kualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	81,33	81,88	82,5	82,75	83	83,25	83,5

		pelay anan keca mata n	/ IKM									
--	--	------------------------------------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**BAB IV**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN SARANG**  
**TAHUN 2024**

Sebagai perwujudan dari beberapa strategi dan arah kebijakan dalam rangka mencapai tujuan strategis, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Kantor Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang.

Adapun rincian program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung fungsi penunjang urusan Pemerintahan Kantor Kecamatan Sarang Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

**I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH  
KABUPATEN/KOTA**

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

**II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN  
PELAYANAN PUBLIK**

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan

2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

### **III. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**

1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

### **IV. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**

1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

### **V. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

### **VI. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**

1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Jumlah program dan kegiatan untuk Rencana Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang adalah sejumlah 6 program dan 13 kegiatan merupakan satu kesatuan dalam urusan umum. Kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya yaitu berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp. **2.967.660.410,-**. Rincian rencana kerja dan pendanaan Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang sebagaimana tertera dalam tabel 4.1 sebagai berikut :

Tabel 4.1.

Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024  
dan Prakiraan Maju Tahun 2025

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan n/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2024			Catat an Penti ng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
				Targ et Capa ian Kine rja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sum ber Dan a		Target Capai an Kinerj a	Kebutuha n Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
<b>1</b>	<b>URUSAN...</b>				<b>2.967.660.410</b>				

1	1			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>NILAI SAKIP OPD</b>	<b>Kec Sarang</b>	<b>69</b>	<b>2.555.183.410</b>	<b>DAU</b>	<b>71</b>	
1	1	2.01		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>% Keselarasan Perencanaan terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Kec Sarang</b>	<b>100</b>	<b>30.000.000</b>	<b>DAU</b>	<b>100</b>	
1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah)	Kec Sarang	2	15.000.000	DAU	2	

1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec Sarang	2	5.000.000	DAU	2	
1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec Sarang	7	10.000.000	DAU	7	
1	1	2.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>% Dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas baik</b>	<b>Kec Sarang</b>	<b>100</b>	<b>2.069.373.100</b>	<b>DAU</b>	<b>100</b>	



1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kec Sarang	19	1.994.473.100	DAU	18	
1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kec Sarang	12	69.900.000	DAU	12	
1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	Kec Sarang	2	5.000.000	DAU	2	

					Keuangan Akhir Tahun SKPD						
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2.05</b>		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>% Dokumen Kepegawaian yang dikelola dengan baik</b>	<b>Kec Sarang</b>	<b>100</b>	<b>8.150.000</b>	<b>DAU</b>		<b>100</b>
1	1	2.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kec Sarang	3	8.150.000	DAU		3
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2.06</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>% Pemenuhan Pelayanan Umum</b>	<b>Kec Sarang</b>	<b>100</b>	<b>127.974.310</b>	<b>DAU</b>		<b>100</b>

1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor yang Disediakan	Kec Sarang	12	6.450.000	DAU	12	
1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kec Sarang	12	15.000.000	DAU	12	
1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kec Sarang	12	14.500.000	DAU	12	
1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik	Kec Sarang	12	46.000.000	DAU	12	

					Kantor yang Disediakan							
1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kec Sarang	12	8.024.310	DAU		12	
1	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kec Sarang	12	18.000.000	DAU		12	
1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec Sarang	12	20.000.000	DAU		12	
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2.07</b>		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan</b>	<b>% Ketercukupan Sarana</b>	<b>Kec Sarang</b>	<b>100</b>	<b>95.000.000</b>	<b>DAU</b>		<b>100</b>	

				<b>Pemerintah Daerah</b>	<b>Prasarana Aparatur</b>							
1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Unit mebelair yang Disediakan	Kec Sarang	3	75.000.000	DAU		3	
1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Kec Sarang	4	20.000.000	DAU		4	
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2.08</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>% Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Kec Sarang</b>	<b>100</b>	<b>160.600.000</b>	<b>DAU</b>		<b>100</b>	
1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	Kec Sarang	12	15.200.000	DAU		12	

					Disediakan							
1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kec Sarang	12	5.000.000	DAU		12	
1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kec Sarang	12	140.400.000	DAU		12	
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2.09</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan</b>	<b>% BDM Dengan Kondidi Baik</b>	<b>Kec Sarang</b>	<b>100</b>	<b>64.086.000</b>	<b>DAU</b>		<b>100</b>	

				<b>Daerah</b>								
1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kec Sarang	18	22.000.000	DAU		18	
1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kec Sarang	27	7.086.000	DAU		27	
1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan		Kec Sarang	1	15.000.000	DAU		1	

				Bangunan Lainnya								
1	1	2.09	#	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana / prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kec Sarang	2	20.000.000	DAU		2	
1	2			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Capaian urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke camat</b>	<b>Kec Sarang</b>		<b>25.000.000</b>	<b>DAU</b>			
1	2	2.02		<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak</b>	<b>% Penyelenggara n Kegiatan Pemerintahan</b>	<b>Kec Sarang</b>	<b>100</b>	<b>15.800.000</b>	<b>DAU</b>		<b>100</b>	



				<b>Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>	<b>di Tingkat Kecamatan</b>						
1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec Sarang	6	15.800.000	DAU		6
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2.04</b>		<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan</b>	<b>Persentase PemDes yang lunas bayar PBB</b>	<b>Kec Sarang</b>	<b>80</b>	<b>9.200.000</b>	<b>DAU</b>		<b>80</b>

				<b>kepada Camat</b>								
1	2	2.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Sarang	1	9.200.000	DAU		1	
1	3			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>% Kontribusi dana desa/kelurahan untuk pemberdayaan masyarakat</b>	<b>Kec Sarang</b>	<b>100</b>	<b>190.827.000</b>	<b>DAU</b>		<b>100</b>	
					<b>Jumlah Desa dengan swadaya masyarakat ≥ Rp.20.000.000,-</b>	<b>Kec Sarang</b>	<b>3</b>		<b>DAU</b>		<b>3</b>	

1	3	2.01		<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>% penyelenggaraa n penunjang kesejahteraan masyarakat yang ditangani</b>	<b>Kec Sarang</b>	100	190.827.000	DAU		100
1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec Sarang	7	40.000.000	DAU		7
1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas	Kec Sarang	23	150.827.000	DAU		23

				Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						
1	4			<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Cakupan penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban umum</b>	<b>Kec Sarang</b>	100	39.450.000	DAU		100
1	4	2.01		<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>% Penyelesaian permasalahan Ketentaraman dan Ketertiban umum</b>	<b>Kec Sarang</b>	100	39.450.000	DAU		100
1	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas	Kec Sarang	23	39.450.000	DAU		23

			Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan							
<b>1</b>	<b>5</b>		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Cakupan penyelenggaraa n urusan pemerintahan umum</b>	<b>Kec Sarang</b>	<b>100</b>	<b>44.000.000</b>	<b>DAU</b>		<b>100</b>	
<b>1</b>	<b>5</b>	<b>2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan</b>	<b>Jumlah fasilitasi pembinaan</b>	<b>Kec Sarang</b>	<b>2</b>	<b>44.000.000</b>	<b>DAU</b>		<b>2</b>	

				<b>Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>wawasan kebangsaan</b>						
1	5	2.01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik	Kec Sarang	100	44.000.000	DAU	100	

			Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia						
<b>1</b>	<b>6</b>		<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>% Desa dengan tata kelola pemerintahan baik</b>	<b>Kec Sarang</b>	<b>100</b>	<b>113.200.000</b>	<b>DAU</b>		<b>100</b>

1	6	2.01		<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Rata-rata IKM Desa</b>	<b>Kec Sarang</b>	<b>75</b>	<b>113.200.000</b>	<b>DAU</b>	<b>75</b>	
1	6	2.01	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec Sarang	23	15.000.000	DAU	23	
1	6	2.01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka	Kec Sarang	23	50.000.000	DAU	23	



				Desa	Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa							
1	6	2.01	5	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kec Sarang	23	43.200.000	DAU		23	
1	6	2.01	6	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan	Kec Sarang	1	-	DAU		1	

					Pemilihan Kepala Desa							
1	6	2.01	8	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kec Sarang	23	-	DAU		23	
1	6	2.01	#	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kec Sarang	23	5.000.000	DAU		23	

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang Tahun 2024 ini memuat tujuan dan sasaran, penyesuaian program dan kegiatan, serta penyesuaian target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Kantor Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada anggaran tahun 2024, sehingga perlu memperhatikan hal - hal sebagai berikut :

#### **a. Catatan Penting**

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja Kantor Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang Tahun 2024 antara lain :

1. Perumusan program dan kegiatan beserta indikatornya pada Renja Kantor Kecamatan Sarang pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Rembang;
2. Penyusunan Rancangan Awal Renja Kantor Kecamatan Sarang ini berpedoman pada RPJPD Kabupaten Rembang tahun 2005 - 2025. Selain itu terdapat penambahan outcome/hasil program, *output* / keluaran kegiatan dan sub kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Kantor Kecamatan Sarang;
3. Penyusunan Rancangan Awal Renja Kantor Kecamatan Sarang ini juga berpedoman pada Rancangan

Awal RKPD Kabupaten Rembang Tahun 2024, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

**b. Kaidah-kaidah pelaksanaan**

Kaidah pelaksanaan dokumen Renja Kantor Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Renja Kantor Kecamatan Sarang ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RDPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang Tahun 2024;
2. Dalam penyusunan RDPA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Rembang. Begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kabupaten Rembang.

**c. Rencana Tindak Lanjut**

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Renja Kantor Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang Tahun 2024 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Renja Kabupaten Rembang Tahun 2024 pada triwulan tiga dan triwulan empat tahun 2024.

Selanjutnya program dan kegiatan pada Renja Kantor Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang

Tahun 2024 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh aparat Kantor Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kabupaten Rembang.

Dengan disusunnya Renja Kantor Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang Tahun 2024 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam Rencana Kerja Kantor Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang pada Tahun 2024.

Rembang, 10 Agustus 2023



CAMAT SARANG

NASATON ROFIQ,SH

Pembina Tk.I

NIP. 19720209 199112 1 001

